



DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tahun 2025.

Penyusunan LKJiP dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban dan tolak ukur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dan pencapaian visi misi organisasi sesuai sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

Dengan diterbitkan LKJiP tahun 2025 diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat memberikan informasi gambaran dan manfaat yang nyata akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata kami berharap agar LKJiP tahun 2025 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

Batam, 26 Januari 2026

Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Batam



Ir. SUHAR, ST.M.PWK
NIP.19740316 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Data Umum Organisasi	3
1.3.1 Tugas dan Fungsi Organisasi SKPD	3
1.3.2 Struktur Organisasi SKPD	4
1.3.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi UPTD Metrologi Legal	9
1.3.4 Sumber Daya Manusia	10
1.3.5 Keuangan	11
1.4 Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah	15
2.2 Indikator Kinerja Utama	20
2.3 Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 Capaian Kinerja	33
3.2 Capaian Kinerja Output	59
BAB IV PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan terkait dengan Capaian Kinerja Program Kegiatan	66
4.2 Saran Dan Usulan Langkah Tindak Lanjut	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Dinas Disperindag T.A 2025.....	11
Tabel 1.2 Anggaran Dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Disperindag T.A 2025.....	12
Tabel 1.3 Anggaran Dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Disperindag T.A2025	12
Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran Disperindag Kota Batam Tahun 2025-2029.....	18
Tabel 2.2 Keterkaitan Misi, Tujuan Dan Sasaran PD Dan Program Kegiatan PD.....	19
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Disperindag Tahun 2025.....	21
Tabel. 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2025.....	29
Tabel. 2.5 Program Dan Kegiatan Disperindag Tahun 2025.....	30
Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	37
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dan Tahun 2025.....	38
Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis S/D Tahun 2025.....	39
Tabel 3.4 Tabel Sasaran Strategis 1.....	40
Tabel 3.5 Pertumbuhan Industri Kecil Menengah S/D Tahun 2025.....	41
Tabel 3.6 Tabel Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Batam Tahun 2025.....	44
Tabel 3.7 Stok Barang Bahan Pokok Per Desember 2025.....	45
Tabel 3.8 Harga Rata-Rata Komoditi Bahan Pokok Januari S/D Desember 2025.....	46
Tabel 3.9 Koefisien Variasi Harga Tahun 2025.....	47
Tabel 3.10 Sasaran Strategis 2.....	48
Tabel 3.11 Tabel Data Survey Layanan Ikm 2025	50
Tabel 3.12. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	52
Tabel 3.13. Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan Disperindag Tahun 2025.....	52
Tabel 3.14 . Realisasi Anggaran Belanja Gaji 2025.....	53
Tabel 3.15 Realisasi Fisik Dan Keuangan Disperindag T.A 2025.....	54
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan Disperindag Tahun 2025	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Nomenklatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Dinas Tipe A dan Dinas Tipe B.

Dinas Tipe A adalah Dinas yang dibentuk untuk mewadahi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, paling banyak 4 (empat) bidang dengan masing-masing paling banyak 3 (tiga) Seksi, sedangkan Dinas Tipe B adalah Dinas yang dibentuk untuk mewadahi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, paling banyak 3 (tiga) bidang dengan masing-masing paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana termaktub pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam merupakan salah satu Dinas Tipe A

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

LKJiP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKJiP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKJiP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Organisasi.

Tujuan penyusunan LKJiP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian, dari LKJiP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

1.3 DATA UMUM ORGANISASI

1.3.1. Tugas dan Fungsi Organisasi SKPD

Melanjutkan ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130), maka ditetapkan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas

Dinas dipimpin oleh seorang **Kepala Dinas**, **Kepala Dinas** mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan;

- pembinaan dan pelaksanaan di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

1.3.2 Struktur Organisasi SKPD

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam ditetapkan bersama Struktur Organisasi Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat
3. Bidang bidang Terdiri dari;
 - Bidang Tertib Niaga
 - Bidang Perdagangan
 - Bidang Perindustrian dan;
 - Bidang Pasar
4. UPTD; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Dinas mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan; pembinaan dan pelaksanaan di bidang perindustrian dan perdagangan; dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Sekretaris mempunyai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, dan mengoordinasikan bidang mengendalikan tugas-tugas di pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan

kepegawaian, pengoordinasian penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta program dan pengoordinasian tugas-tugas bidang. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris membawahi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Perencanaan Program dan Kelompok Jabatan Fungsional, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

- ✓ pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di lingkungan Dinas;
- ✓ pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
- ✓ pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
- ✓ pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;
- ✓ pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN;
- ✓ pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPTD; dan
- ✓ pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Bidang Perdagangan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup bidang perdagangan. Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Koordinator Urusan Ekspor dan Impor, Sub Koordinator Urusan Sarana Distribusi Perdagangan dan Sub Koordinator Urusan Pengawasan Usaha dan Jasa Perdagangan. Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- ✓ penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pen serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Perdagangan;

- ✓ penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Perdagangan.
- ✓ dan penyelenggaraan pelayanan publik administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Perdagangan; dan
- ✓ pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada bidang Perdagangan.

Bidang Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup bidang pasar. Dalam melaksanakan urusan kedinasan Kepala Bidang Pasar dibantu oleh Sub Koordinator Urusan Penataan dan Pemeliharaan Pasar Rakyat dan Tradisional, Sub Koordinator Urusan Bina Pasar dan Sektor Informal dan Sub Koordinator urusan Bina Pasar dan Sektor Informal. Kepala Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi :

- ✓ penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Pasar;
- ✓ penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Pasar.
- ✓ penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Pasar; dan
- ✓ pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada bidang Pasar.

Bidang Tertib Niaga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup bidang tertib niaga.. Kepala Bidang Tertib Niaga dalam melaksanakan tugas kedinasan dibantu oleh Sub Koordinator Urusan Pengawasan Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen, Sub Koordinator Urusan Informasi dan Penyuluhan Perdagangan dan Sub Koordinator Urusan Penegakan Hukum. Kepala Bidang Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi :

- ✓ penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Tertib Niaga;
- ✓ penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Tertib Niaga
- ✓ penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang Tertib Niaga; dan
- ✓ pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pada bidang Tertib Niaga.

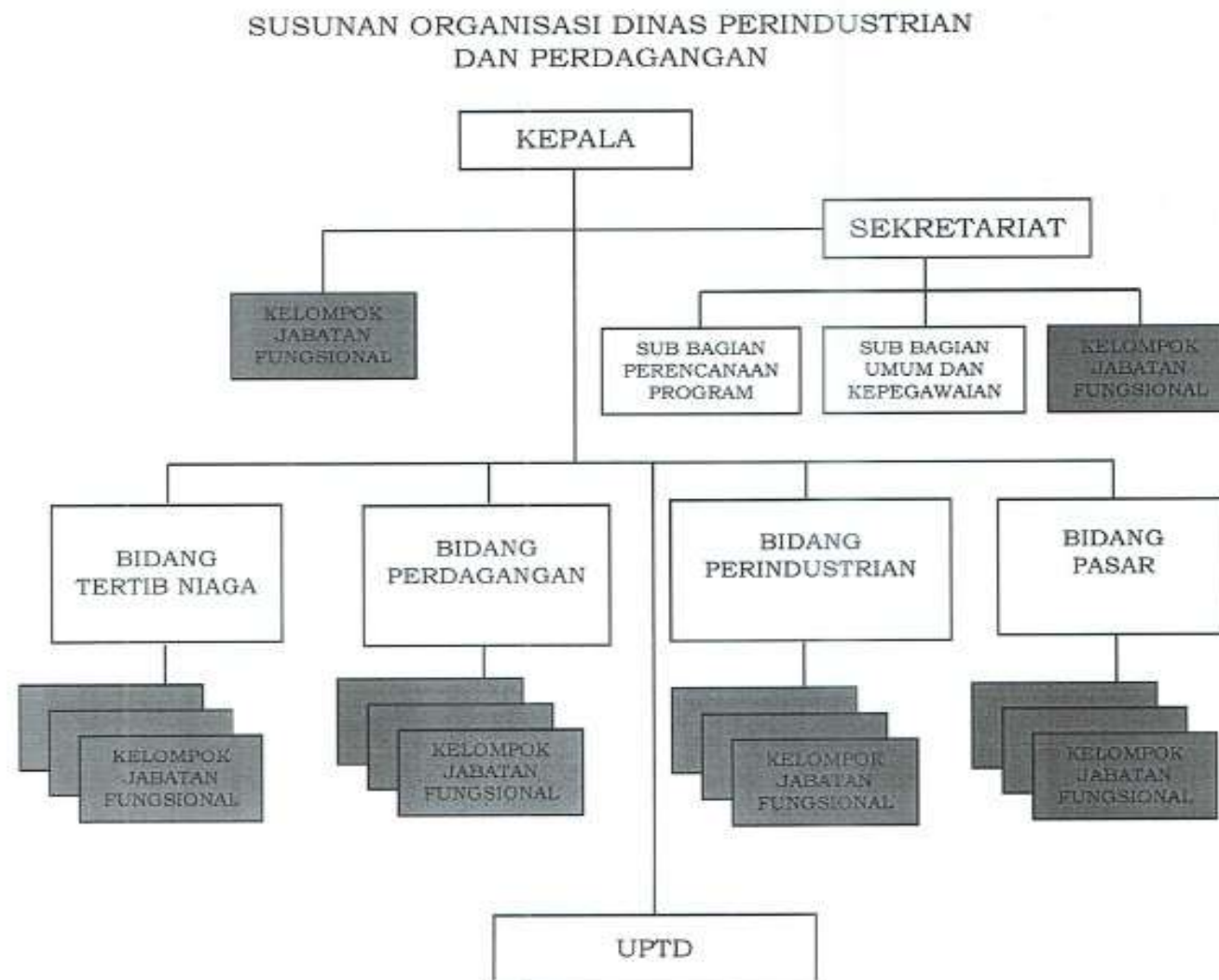
Bidang Perindustrian melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup bidang perindustrian. Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas kedinasan dibantu oleh Sub Koordinator Urusan Sarana Industri, Sub Koordinator Urusan Kerajinan Industri. Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- ✓ penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta

evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang perindustrian;

- ✓ penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang perindustrian; pengoordinasian,
- ✓ dan penyelenggaraan pelayanan publik administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan, dan pengembangan pada bidang perindustrian;
- ✓ pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pada bidang perindustrian;

GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM



1.3.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi UPTD Metrologi Legal

A. Tujuan Pembentukan

Pembentukan Unit Pelayanan Teknis UPTD Meterologi Legal merupakan tindak lanjut dari Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meterologi Legal, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk di Tera dan /atau di Tera ulang serta syarat-syarat bagi alat Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran

B. Tugas dan Fungsi

Tugas UPTD adalah untuk melakukan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya di wilayah Kota Batam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) maka UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana / program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan memelihara standar kerja
- b. Pemeliharaan ketertelusuran standart kerja dan perlengkapannya
- c. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan bertanggungjawab terhadap penggunaan Cap Tanda Tera
- d. Penyusunan rencana / program Tera dan Tera Ulang UTTP
- e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan

1. Struktur Organisasi

Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan walikota Batam Nomor 11 Tahun 2018 tentang UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam terdiri dari :

- a. Kepala UPTD
- b. Sub bagian tata usaha, membawahi:
 1. Urusan umum dan kepegawaian;
 2. Urusan keuangan;
 3. Urusan perencanaan dan pelaporan;
 4. Urusan perlengkapan.
- c. Kelompok jabatan fungsional.

Struktur Organisasi UPTD Metrologi Legal



1.3.4 Sumber Daya Manusia

– Menurut Golongan

No	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Struktural	-	-	5	5	10
2.	Fungsional	-	-	8	1	9
3.	Staf	-	2	24	1	27
Jumlah		-	2	37	7	46

– Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Menurut Golongan					Jumlah
		SMU	D3	S1	S2	S3	
1.	Struktural	-	-	5	4	1	10
2.	Fungsional	-	-	8	1		9
3.	Staf	5	2	17	3		27
Jumlah		5	2	30	8	1	46

– Tenaga Honorer Daerah (THD)

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	SLTA	2	
	Jumlah	2	

– PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	S1	22	
2	D3	5	
3	SLTA	37	
	Jumlah	64	

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam telah mempunyai 2 (dua) orang pegawai Penyidik Negeri Sipil Metrologi (PPNS-Met) dan 1 (satu) orang Petugas Pengawasan Barang dan Jasa (PPBJ) yang siap untuk melakukan pengawasan di bidang perdagangan serta sudah memiliki 4 (empat) orang Penera Ahli dan 1 (satu) orang Pengamat Tera di Bidang Kemetrologian yang sudah bersertifikasi untuk membantu Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Tera Ulang pada UPTD Metrologi Legal

1.3.5 Keuangan

Realisasi belanja Dinas Disperindag Kota Batam pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 27.289.149.909,00 dari anggaran sebesar Rp 30.638.728.563,00 atau terealisasi sebesar 89,06 % dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Dinas Disperindag Kota Batam
Tahun 2025**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	RASI O%	LEBIH/KURANG (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)
1.	Belanja Operasi	29.151.969.363,00	25.936.734.942,00	88,97	3.215.234.421,00	27.768.659.529,00
2.	Belanja Modal	1.486.759.200,00	1.352.414.967,00	90,96	134.344.233,00	710.500.000,00
JUMLAH		30.638.728.563,00	27.289.149.909,00	89,06	3.349.578.654,00	28.479.159.529,00

✓ **Belanja Operasi**

Belanja Operasi pada Dinas Disperindag Kota Batam pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 25.936.734.942,00 atau sebesar 88,97% dari anggaran sebesar Rp 29.151.969.363,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi
Belanja Operasi Dinas Disperindag Kota Batam Tahun 2025**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	RASIO %	LEBIH/KURANG (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	15.625.795.563,00	14.519.928.905,00	92,92	1.105.866.658,00	12.663.022.166,00
2.	Belanja Barang & Jasa	8.276.173.800,00	6.166.806.037,00	74,51	14.442.979.837,00	15.105.637.363,00
3.	Belanja Subsidi	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	100,00	0,00	0,00
JUMLAH		29.151.969.363,00	25.936.734.942,00	88,97	3.215.234.421,00	27.768.659.529,00

✓ **Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai pada Dinas Disperindag Kota Batam mencapai sebesar Rp 14.519.928.905,00 atau sebesar 92,92% dari anggaran sebesar Rp 15.625.795.563,00
Realisasi Belanja Pegawai tersebut dipergunakan untuk pembayaran Gaji dan

Tunjangan sebesar Rp 6.356.804.485,00 dan Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp 8.163.124.420,00 .

Tabel. 1.3 Anggaran dan Realisasi
Belanja Pegawai Dinas Disperindag Kota Batam Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	RASI O%	LEBIH/KURANG (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.875.478.945,00	6.356.804.485,00	92,46	518.674.460,00	5.617.872.930,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	8.750.316.618,00	8.163.124.420,00	93,29	587.192.198,00	6.996.309.236,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	48.840.000,00
JUMLAH		15.625.795.563,00	14.519.928.905,00	92,92	1.105.866.658,00	12.663.022.166,00

1.4 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan menguraikan tentang: Gambaran Umum Organisasi, Aspek Strategik Organisasi, dan Sistematika Penyajian

Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tahun 2025 meliputi Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tahun 2025 – 2029 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas sasaran untuk tahun 2025.

Bab 4 Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam secara terus menerus. Berbagai langkah strategis yang dilaksanakan meliputi:

1. Koordinasi dengan seluruh distributor bahan pokok yang terus dilakukan dalam rangka menjaga pasokan dan distribusi bahan pokok di Kota Batam.
2. Melaksanakan Kerjasama Antar Daerah untuk komoditi yang sangat berpengaruh terhadap inflasi di Kota Batam, contoh : Cabe dan Telur Ayam
3. Pemantauan harga bahan Pokok di beberapa pasar dilaksanakan rutin 3 kali dalam seminggu,
4. Melaksanakan Operasi Pasar dan Bantuan subsidi bahan pokok oleh Pemerintah Kota Batam menjelang hari-hari besar keagamaan
5. Koordinasi lintas sektor dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
6. Meningkatkan Fungsi Pasar Pemerintah untuk memperpendek jalur distribusi dan memberikan kemudahan akses bagi konsumen

Terjaganya tingkat inflasi yang rendah dan stabil berdampak positif terhadap daya beli masyarakat serta meningkatkan kepastian usaha bagi pelaku perdagangan. Dengan demikian, sasaran meningkatnya daya saing sektor perdagangan dapat tercapai dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Tabel inflasi kota batam tahun 2025 dapat dilihat melalui table di bawah ini ;

Tabel 3.6 Tabel Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Batam Tahun 2025

No	Bulan	Indeks Harga Konsumen Bulanan Kota Batam	Inflasi Bulanan
		2025	
1	Januari	108,65	2,54
2	Februari	108,68	2,88
3	Maret	108,8	2,53
4	April	109,21	2,81
5	Mei	108,8	2,04
6	Juni	108,74	1,68
7	Juli	108,9	2,30
8	Agustus	108,99	2,37
9	September	109,67	2,82
10	Oktober	110,14	3,19
11	November	110,41	3,21
12	Desember	111,67	3,68
<i>Rumus Inflasi Tahun Kalender = $\frac{IHK \text{ bulan Desember} - IHK \text{ Bulan Januari}}{IHK \text{ Bulan Januari}} \times 100$</i>			
$\begin{aligned} \text{Inflasi Tahun Kalender 2025} &= \frac{111,67 - 108,65}{108,65} \times 100 \\ &= 2,78 \end{aligned}$			

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kota Batam

3.7 Tabel Stok Barang bahan Pokok Per Desember 2025

No.	Komoditi	Jumlah (Ton)
1	Beras	2.545
2	Gula	230
3	Minyak Goreng	763
4	Telur	14.358 (Papan)
5	Daging Ayam Beku	543
6	Daging Sapi Beku	122
7	Bawang Merah	200
8	Bawang Putih	234
9	Tepung	915
10	Kacang Tanah	205

Sumber : Laporan Stok Asosiasi Distributor Kota Batam (ADKB)

Laporan Stok Bahan Pokok oleh Asosiasi Distributor Kota Batam rutin dilaksanakan 3 kali dalam seminggu. Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok komoditas strategis seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging, cabai, bawang merah, dan bawang putih tetap aman serta mencegah terjadinya kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga.

3.8. Tabel Harga Rata-rata Komoditi Bahan Pokok Januari s/d Desember 2025

NO	KOMODITI	HARGA RATA-RATA PER BULAN JANUARI S.d DESEMBER 2025												HARGA RATA-RATA SEPANJANG TAHUN
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Beras Cap Horas (Medium)	13.227	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.269	13.000	12.678	12.323	12.108	12.542	12.346
2	Beras Cap Harumas (Premium)	14.591	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.529	14.380	14.400	14.542	15.014	14.788
3	Kedelai Lokal	14.068	13.500	13.071	13.109	13.136	13.175	13.059	13.538	12.250	12.457	12.500	12.639	13.042
4	Bawang Merah Birma	-	-	-	-	-	-	18.610	17.882	18.575	16.171	16.731	17.892	17.644
5	Bawang Putih Kating	33.909	31.409	32.619	33.500	33.545	30.950	30.346	28.824	30.650	31.257	28.833	29.222	31.255
6	Gula Pasir Curah	14.705	15.795	15.910	15.000	14.739	14.050	13.865	15.206	14.500	14.086	12.375	14.639	14.572
7	Gula Pasir Kemasan	16.500	16.500	16.500	16.719	16.750	16.750	16.750	17.324	16.713	17.157	17.500	17.556	16.893
8	Minyak Goreng Curah	17.500	17.500	-	16.000	16.624	16.806	16.733	16.923	16.000	16.000	16.000	16.000	16.553
9	Minyak Goreng Kemasan Premium	17.500	17.500	17.500	18.031	18.216	17.875	17.875	17.647	17.875	17.843	17.875	17.875	17.801
10	Tepung Terigu	9.500	9.386	9.357	9.922	9.057	8.550	9.029	11.059	12.250	12.086	12.000	12.000	10.350
11	Telur Ayam Ras	57.091	54.955	49.714	50.750	49.523	51.975	54.038	52.765	54.325	54.686	54.958	56.694	53.456
12	Daging Ayam Ras Karkas	34.045	33.409	31.952	34.875	36.614	35.725	35.788	33.706	38.025	37.657	39.521	42.194	36.126
13	Daging Sapi Impor Beku	88.182	87.955	87.619	91.719	92.795	93.375	111.827	102.941	99.750	97.143	98.750	109.167	96.769
14	Kacang Hijau	18.705	19.114	20.429	20.172	20.705	23.850	23.788	24.824	23.452	23.126	23.875	23.958	22.166
15	Kacang Tanah	20.068	19.568	19.214	19.641	21.295	21.300	21.038	20.471	20.525	21.571	22.917	23.389	20.916

Dari table diatas, didapat beberapa komoditi yang memiliki fluktuasi harga yang cukup tinggi seperti Tepung terigu dan Daging Sapi , fluktuasi tersebut dapat di lihat dalam tabel koefisien variasi harga sebagaimana table berikut

3.9 .Tabel Koefisien Variasi Harga Tahun 2025

NO	KOMODITI	HARGA RATA-RATA PER BULAN JANUARI S.d DESEMBER												HARGA A	HARGA A	HARGA	Standar Deviasi	Koefisien Variasi (CV) =
		JANUA RI	FEBRU ARI	MAR ET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST US	SEPTE MBER	OKTO BER	NOVE MBER	DESE MBER	RATA- RATA	TERTI NGGI (MAX)	TEREN DAH (MIN)	(STDEV) = STDEV (3 S.d 14)	18/15*10 0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Beras Cap Horas (Medium)	13.227	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.269	13.000	12.678	12.323	12.108	12.542	12.346	13.227	12.000	427,89	3,47
2	Beras Cap Harumas (Premium)	14.591	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.529	14.380	14.400	14.542	15.014	14.788	15.014	14.380	270,37	1,83
3	Kedelai Lokal	14.068	13.500	13.071	13.109	13.136	13.175	13.059	13.538	12.250	12.457	12.500	12.639	13.042	14.068	12.250	519,37	3,98
4	Bawang Merah Birma	-	-	-	-	-	-	18.610	17.882	18.575	16.171	16.731	17.892	17.644	19.049	16.171	991,95	5,62
5	Bawang Putih Kating	33.909	31.409	32.619	33.500	33.545	30.950	30.346	28.824	30.650	31.257	28.833	29.222	31.255	33.909	28.824	1.819,30	5,82
6	Gula Pasir Curah	14.705	15.795	15.910	15.000	14.739	14.050	13.865	15.206	14.500	14.086	12.375	14.639	14.572	15.910	12.375	941,99	6,46
7	Gula Pasir Kemasan	16.500	16.500	16.500	16.719	16.750	16.750	16.750	17.324	16.713	17.157	17.500	17.556	16.893	17.556	16.500	387,32	2,29
8	Minyak Goreng Curah	17.500	17.500	-	16.000	16.624	16.806	16.733	16.923	16.000	16.000	16.000	16.000	16.553	17.500	16.000	596,77	3,61
9	Minyak Goreng Kemasan Premium	17.500	17.500	17.500	18.031	18.216	17.875	17.875	17.647	17.875	17.843	17.875	17.875	17.801	18.216	17.500	223,57	1,26
10	Tepung Terigu	9.500	9.386	9.357	9.922	9.057	8.550	9.029	11.059	12.250	12.086	12.000	12.000	10.350	12.250	8.550	1.415,76	13,68
11	Telur Ayam Ras	57.091	54.955	49.714	50.750	49.523	51.975	54.038	52.765	54.325	54.686	54.958	56.694	53.456	57.091	49.523	2.527,56	4,73
12	Daging Ayam Ras Karkas	34.045	33.409	31.952	34.875	36.614	35.725	35.788	33.706	38.025	37.657	39.521	42.194	36.126	42.194	31.952	2.882,00	7,98
13	Daging Sapi Impor Beku	88.182	87.955	87.619	91.719	92.795	93.375	111.827	102.941	99.750	97.143	98.750	109.167	96.769	111.827	87.619	8.087,35	8,36
14	Kacang Hijau	18.705	19.114	20.429	20.172	20.705	23.850	23.788	24.824	23.452	23.126	23.875	23.958	22.166	24.824	18.705	2.167,30	9,78
15	Kacang Tanah	20.068	19.568	19.214	19.641	21.295	21.300	21.038	20.471	20.525	21.571	22.917	23.389	20.916	23.389	19.214	1.288,51	6,16
TOTAL RATA-RATA KOOFISIEN VARIASI HARGA TAHUN 2025																		5,67

Koefisien variasi harga strategis menggambarkan seberapa jauh fluktuasi harga yang terjadi untuk setiap komoditas yang dipantau. Kondisi yang diharapkan adalah angka Koefisien Variasi (CV) yang kecil karena semakin rendah angka koefisien variasi berarti harga komoditas strategis yang semakin stabil.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas pelayanan Pemerintahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	92,79	92,98	100.2

Sasaran strategis “Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan” pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan diukur melalui indikator kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan, sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Pada tahun 2025 hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan capaian yang baik dan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 92.98 dengan tingkat capaian 100,20% . Penilaian menggunakan kuesioner dilakukan terhadap 9 unsur Pelayanan yaitu Persyaratan ,Sistem Mekanisme dan Prosedur,Waktu ,Penyelesaian,Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan , Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Sarana dan Prasarana dengan jumlah Responden 53 orang . Setiap Pelayanan dapat dinilai dengan Poin dari range angka 1-4, setiap 1 poin memberikan bobot penilaian 25%,semakin tinggi poin yang diberikan , menunjukan semakin tinggi tingkat Kepuasan masyarakat terhadap Kinerja

Pelayanan yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. Setelah dilakukan Perhitungan terhadap jumlah Poin pada 9 layanan diatas, di dapatkan nilai rata-rata dari seluruh unsur Pelayanan sebesar 3.72 , kemudian dibagi 4 (Nilai bobot maksimal) dan dikalikan 100, sehingga didapatkan angka 92.98,dan dapat dikategorikan sangat baik dengan Perdikat A; 88,31 - 100,00. Hal ini mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah berjalan secara efisien dan efektif, serta mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Pencapaian tersebut didukung oleh berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, antara lain penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. Selain itu, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelayanan yang diberikan.

Dengan meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan telah tercapai. Kedepan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan terus melakukan inovasi dan perbaikan layanan guna meningkatkan kepuasan masyarakat serta mewujudkan pelayanan publik yang prima. Perhitungan capaian kinerja layanan dapat dilihat melalui table survey Layanan IKM dibawah ini .

TABEL.3.11 TABEL DATA SURVEY LAYANAN IKM 2025
PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN

NO. RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	3	3	4	3	3	3	4	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	3	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	3	4	4	3	4	4	3
8	4	3	3	4	3	4	4	4	3
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	3	4	4	4	4	4	4	4	3
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	3	3	3	4	3	3	3	4	4
15	3	3	4	4	3	4	3	4	3
16	4	3	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	3
18	4	3	4	4	3	4	4	4	4
19	3	3	3	4	3	3	3	4	3
20	3	3	3	4	3	3	3	4	3
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	3	3	4	3	3	3	4	3
23	3	3	3	4	3	3	3	4	3
24	4	3	4	4	4	4	3	4	4
25	3	3	4	4	3	4	3	4	3
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	3	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	3	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	3	3	3	4	3	3	4	4	3
34	3	3	3	4	3	3	4	4	3
35	3	3	3	4	3	3	3	4	3
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	3	3	3	4	3	4	4	4	3
38	3	3	3	4	3	3	3	4	2
39	4	4	4	4	4	4	4	4	3
40	4	4	4	4	4	4	3	4	3
41	3	3	3	4	3	3	3	4	3

42	4	4	3	4	4	4	4	4	4
43	4	3	3	4	4	3	3	4	3
44	3	3	4	4	3	3	4	4	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	3	4	4	4	3
48	4	3	4	4	4	4	4	4	3
49	3	3	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	3	4	3	3	2
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	2
53	4	4	4	4	3	4	4	4	4
SNilai /Unsur	195	189	196	212	192	198	196,8	210	185
NRR / Unsur	3,68	3,57	3,70	4,00	3,62	3,74	3,71	3,96	3,49
NRR tertbg/ unsur	0,409	0,396	0,411	0,444	0,403	0,415	0,413	0,440	0,388
IKM Unit pelayanan = $3.72 / 4 * 100 = 92.97$									

*)

3,72

**) 92,97

Surat Keterangan Asal dengan Target 8000 Dokumen. Alokasi Anggaran Rp. 36.893.500,00,- menjadi Rp. 9.218.000,00 pada APBD- Perubahan

6. Program Perencanaan Pembangunan Industri

- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Output berupa Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan target 1 (satu) Dokumen. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 186.606.000,00 Menjadi Rp. Rp. 156.726.000,-pada APBD Perubahan
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dengan Indikator Kinerja Output berupa Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dengan target 1 (satu) Dokumen. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.853.329.500,00 Menjadi Rp. Rp. 409.000.000,00,-pada APBD Perubahan
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dengan Indikator Kinerja Output Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dengan target 1 (satu) Dokumen. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 52.965.000,00pada APBD Perubahan mengalami penambahan anggaran menjadi Rp. 131.268.500
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri serta peran serta masyarakat dengan indikator kinerja ouput Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan

Pelaksanaan Pemberdayaan Industri serta peran serta masyarakat dengan Target 1 (satu) Dokumen. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.351.911.500,00 pada APBD Perubahan menjadi Rp. 4.863.976.000

Secara Keseluruhan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun Anggaran 2024 tersaji pada table dibawah ini :

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025

No	Urusan	Perangkat Daerah	Kebijakan RKPD	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							Target	Realisasi	% Capaian Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
28	URUSAN PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Disperindag	Angka	70,58	70,58	100,0			NIHIL
					Indeks Pelayanan Kesekretariatan Disperindag	Angka	92,79	91,67	98,8			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Persen	100	100	100,0			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,0			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Persen	100	100	100,0			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Persen	100	100	100,0			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi	Persen	100	100	100,0			

				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	Persen	100	100	100,0			
				Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Persen	100	100	100,0			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang di tingkatkan kualitasnya	Persen	9,62	13,46	140,0			
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang terfasilitasi	Persen	25,00	25,00	100,0			
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	75,00	76,67	102,2			
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	Persen	<6	<5,67	105,8			
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	USD (Juta)	1000	2103	210,3			
				Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha berorientasi Ekspor yang dipromosikan	Persen	100	100	100,0			
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tertib Ukur	Persen	90,00	90,78	100,9			

4.2. Saran Dan Usulan Langkah Tindak Lanjut

Saran dan Uusulan langkah tindak lanjut yang dapat disampaikan dan dilaksanakan yaitu :

1. Perlu dilaksanakannya sosialisasi yang berkelanjutan secara intensif dan menyeluruh pada segenap aparatur pemerintah, agar setiap individu memahami target kinerja yang harus diwujudkan bersama-sama
 2. Meningkatkan inovasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam, termasuk koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait Gudang Pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah
 3. Mengembangkan komunikasi dan pengoordinasian dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait kewenangan yang terbatas pada Kabupaten/Kota, namun langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat seperti di urusan bidang energi dan sumber daya mineral (BBM, LPG, dan Kelistrikan)
 4. Aktif melakukan pengoordinasian dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Batam dalam mengendalikan inflasi terhadap bahan kebutuhan pokok
- Kami berharap bahwa LKJiP 2025 ini dapat menjadi bahan yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025, dan khususnya dapat menjadi bahan evaluasi pada proses perbaikan kinerja pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan di masa yang akan datang.